

LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN
DOSEN MENGABDI PULANG KAMPUNG
“INTEGRASI AGRIBISNIS USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR UNTUK
KEBERLANJUTAN USAHA RAKYAT DI SOLO RAYA”



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2023

LEMBAR PENGESAHAN KEGIATAN DOSEN PULANG KAMPUNG

Judul kegiatan : Integrasi Agribisnis Usaha Peternakan Ayam Petelur
untuk Keberlanjutan Usaha Rakyat di Solo Raya

Nama Dosen yang melaksanakan kegiatan : 1. Dr Ir Andriyono Kilat Adhi NIDN 0011066011
2. Prof Dr Rachmat Pambudy NIDN 0023125907
3. Prof Dr Harianto NIDN 0021105807

Usulan Biaya kegiatan : Rp.40.000.000.-

Lokasi : Wilayah Solo Raya

Nama Mitra : Drh Heru Santoso

Jumlah Mahasiswa terlibat : 3

Jumlah Alumni terlibat : 1

Jumlah staf pendukung terlibat : 1

Bogor, 5 Januari 2023

Dr. Ir. Andriyono Kilat Adhi
NIP. 19600611 198403 1 002

PENDAHULUAN

Industri peternakan ayam petelur sebagai sistem dan usaha agribisnis semakin didominasi oleh integrasi peternak ayam skala kecil dengan perusahaan penyedia faktor produksi, yaitu melalui kerjasama dalam bentuk inti-plasma. Perusahaan penyedia input bertindak sebagai inti dan peternak ayam skala kecil berperan sebagai plasma yang menjalankan aktivitas budidaya dan kegiatan peternakan ayam petelur di tingkat on-farm.

Di Wilayah Solo Raya, peternak ayam petelur rakyat telah membentuk Asosiasi Pinsar Petelur Nasional, akan tetapi dalam kegiatan usahanya masih tergantung bahan baku input usaha, antara lain pakan dan DOC oleh Industri Pakan Besar. Dengan demikian keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur sangat tergantung oleh sub-sistem hulu yaitu Industri Pakan Ternak dan industri penyedia bibit ayam umur sehari. Hal ini sangat berpengaruh dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Peternak Ayam Petelur.

Penerapan Sistem dan Usaha Agribisnis melalui Integrasi Usaha, sangat penting bagi masyarakat peternak ayam petelur rakyat skala kecil untuk menerima program inovasi IPB. Dengan penerapan inovasi IPB di wilayah Solo Raya, diharapkan berkontribusi terhadap capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), antara lain: pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (08), konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (12), dan kemitraan untuk mencapai tujuan (17).

TUJUAN

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak ayam petelur rakyat skala kecil
2. Memperkuat kelembagaan peternak ayam petelur rakyat skala kecil
3. Meningkatkan kinerja dan daya saing agribisnis peternakan ayam petelur rakyat skala kecil.

MITRA

Mitra yang diusulkan adalah Asosiasi Pinsar Petelur Nasional (PPN) Solo Raya yang anggotanya tersebar di wilayah Solo Raya.

TARGET

1. Terbentuknya Integrasi Lembaga peternak ayam petelur rakyat dengan menerapkan sistem dan usaha agribisnis
2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak ayam petelur rakyat
3. Peningkatan kinerja dan daya saing agribisnis hulu, on-farm dan hilir peternakan ayam petelur rakyat

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Gambaran Umum dan Permasalahan Peternakan Ayam Petelur di Solo Raya

Pelaksanaan kegiatan Dosen Mengabdi Pulang Kampung (Dospulkam) dengan topik Integrasi Agribisnis Usaha Peternakan Ayam Petelur untuk Keberlanjutan Usaha Rakyat di Solo Raya, diawali dengan kunjungan perkenalan dan komunikasi dengan pengurus Pinsar Petelur Nasional, yakni Drh. Heru Santoso. Dalam pertemuan awal dengan Sekretaris Pinsar Petelur Nasional, yaitu organisasi peternak mandiri ayam petelur di Solo Raya, dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Pengabdian Pada Masyarakat dengan nama Dosen Mengabdi Pulang Kampung yang dilakukan oleh dosen IPB di daerah asalnya, dalam hal ini Solo, dengan Ketua Tim Dr Andriyono Kilat Adhi.

Oleh karena itu dalam brainstorming awal, permasalahan yang ada dalam sistem dan usaha agribisnis ayam petelur di Pinsar Petelur Nasional Solo Raya ialah rendahnya harga jual telur, mahalnnya harga bibit ayam (DOC) serta mahalnnya harga pakan ternak petelur (layer). Terkait dengan teknik budidaya dan produksi telur, peternak anggota Pinsar Petelur Nasional di Solo sudah menjalankan prinsip Good Farming Practices (GFP). Komunikasi antar peternak berjalan sangat baik. Hanya ketiga hal tersebut yang menjadi persoalan utama peternak di Solo Raya.

Peternakan ayam petelur di Solo termasuk dalam peternak ayam mandiri, dimana sebagian besar merupakan perusahaan kecil dan menengah. Lokasi peternakan tersebar di kabupaten Solo Raya, yakni Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali dan Wonogiri. Dalam usahanya, peternak ayam petelur tergabung dalam Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera menikmati harga telur yang ideal.

Pada saat pelaksanaan kegiatan Dosen Mengabdi Pulang Kampung, harga telur di Solo berfluktuasi dan banyak tertekan. Selain dampak pandemi COVID 19, penurunan permintaan telur terjadi karena ada indikasi kelebihan telur dari integrator yang tidak bisa ditetaskan menjadi ayam, sehingga dilempar di pasar sebagai telur. Dampak besarnya suplai tersebut, harga telur ayam sempat turun sebesar 25-30 persen, yakni di angka Rp. 16.500/kg harga kandang. Selain itu, penurunan harga telur diperparah dengan kenaikan harga bahan baku pakan yakni komoditas jagung yang mencapai Rp. 6.000/kg. Dimana harga ideal jagung adalah Rp. 5.200/kg.

Menurut Pinsar Petelur Nasional peternak akan balik modal (kondisi Break Even Point) apabila harga telur paling tidak 3.5 kali harga pakan. Dengan kata lain, peternak akan mengalami kerugian apabila harga telur ayam di bawah Rp. 20.000 per kg. Diharapkan kegiatan Dospulkam dapat membantu peternak yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional agar tidak mengalami kerugian akibat suplai telur yang berlebih dan naiknya harga pakan akibat kenaikan harga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak.

Selama ini Pinsar Petelur Nasional Solo mengharapkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melindungi peternak kecil. Antara lain dengan menjadi regulator yang menghubungkan peternak besar dan peternak kecil. Agar peternak kecil dapat hidup terus, maka perlu memodernisir peralatan yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh peternak besar. Dalam merealisasikan agar harga telur dapat dipertahankan tetap di atas BEP, maka peternak harus melakukan apkir dini, yakni di usia ternak 80-90 minggu. Hal ini untuk mengurangi biaya tetap pakan yang harganya terus melambung. Tanpa melakukan kegiatan apkir dini, maka antara harga pakan dan harga jual telur ayam tidak seimbang.

2. Upaya dan Harapan PPN Solo pada Tim Dosen Mengabdi Pulang Kampung

Ketua Pinsar Petelur Nasional Solo Raya telah meminta pemerintah agar segera menetapkan Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) telur ayam, bibit ayam (DOC/"day old chick"), jagung serta pakan ayam untuk mewujudkan keseimbangan harga telur ayam di tingkat produsen dan konsumen. Dalam kesempatan itu, PPN Solo Raya mengharapkan agar dosen dan akademisi IPB yang hadir di Solo saat itu, yakni Prof Dr Rachmat Pambudy dan Dr Andriyono Kilat Adhi, sebagai dosen asli Solo dapat menyampaikan kepada pihak pemerintah agar segera mengeluarkan HAP tersebut, sehingga harga telur ayam dapat stabil, dan terwujud keseimbangan harga yang dirasa adil bagi peternak, pedagang serta konsumen. Apabila diplomasi para dosen itu berhasil, diharapkan konsumen bisa mendapat harga yang wajar, pedagang mendapatkan hasil yang layak, serta peternak juga menerima keuntungan yang wajar.

Kenyataannya hingga saat ini, harga bibit ayam (DOC) belum ada acuan pasti dan cenderung masih tinggi, yakni antara Rp. 13.000 hingga Rp. 15.000 per ekor serta pakan ayam berada di kisaran harga Rp. 7.600 per kg. Dengan masih tingginya harga dua komponen produksi di tingkat hulu tersebut, para peternak sulit untuk mengikuti HAP telur ayam yang diusulkan Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 22.000 – 24.000 per kilogram di tingkat peternak. Selama ini peternak dalam menentukan harga telur ayam berpatokan bahwa 1 Kilogram telur ayam dihasilkan oleh 3.5 kali harga pakan.

Dengan demikian, HAP telur ayam yang diusulkan oleh Badan Pangan Nasional tersebut bisa direalisasikan oleh peternak, apabila harga jagung atau pakan ayam turun menjadi Rp. 4.200 per kg di tingkat petani dan bibit ayam (DOC) turun di kisaran Rp. 9.000 – Rp. 11.000 per ekor. Selain itu, diharapkan agar HAP telur ayam perlu disertai dengan penetapan HAP bibit (DOC) serta pakan ayam yang berkekuatan hukum. HAP tersebut tetap dapat dikoreksi apabila terjadi ketidaksesuaian harga komponen produksi lain, salah satunya adalah kenaikan harga BBM.

Selain itu, dalam upaya menstabilkan harga bibit ayam petelur (DOC), Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera telah membangun breeding farm Grand Parent Stock (GPS) ayam petelur (layer) di Desa Cinta Mekar, Subang, Jawa Barat pada luas lahan 2 hektar. Untuk pertama

kalinya usaha breeding GPS ayam petelur dijalankan sejumlah peternak yang bergabung dalam wadah koperasi.

Selama ini, walaupun usaha peternakan ayam petelur 98 % dijalankan peternak rakyat dan peternak UMKM, namun di sektor hulu yaitu pembibitan GPS yang menghasilkan PS (Parent Stock) masih didominasi perusahaan maupun konglomerasi peternakan yang terintegrasi. Nantinya breeding farm ini akan diisi sebanyak 5.000 ekor GPS yang akan menghasilkan kurang lebih sekitar 290 ribu PS setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut akan menghasilkan sedikitnya 6 juta ekor Final Stock (FS) atau DOC (ayam umur sehari). Hasil produksi tersebut nantinya akan diserap oleh sejumlah koperasi dan UMKM ayam petelur yang berlokasi di Bogor dan Ciamis, Jawa Barat, Lampung, Kendal, Blitar, Solo serta Yogyakarta.

Hadirnya Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera dapat menjadi alternatif dan jawaban untuk kemandirian peternak. Koperasi menjadi harapan untuk meningkatkan kekuatan peternak unggas mandiri yang selama ini terhimpit persaingan menghadapi konglomerasi integrator peternakan. Upaya membentuk koperasi mulai dari primer, sekunder dan induk saat ini sudah merupakan suatu keharusan jika peternak mandiri ingin maju dan menjalankan usahanya. Selain itu diharapkan agar koperasi ini bisa menjadi alternatif bagi industri perunggasan di tanah air.

Pihak pemerintah, yakni Kementerian Koperasi dan UKM mendukung penuh langkah strategis dari Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera yang masuk ke usaha pembibitan GPS layer. Hal ini diharapkan bisa menjadi alternatif dan solusi bagi usaha peternakan ayam yang selama ini dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera telah mengambil inisiatif fundamental. Dengan hadirnya koperasi ini bisa menjawab kebutuhan para peternak mandiri, dan membuat peternak unggas mencapai skala bisnis serta lebih efisien dalam proses produksinya.

Kegiatan usaha koperasi perunggasan yang masuk ke bisnis hulu, khususnya pembibitan GPS adalah yang pertama kali di Indonesia. Usaha seperti ini sebelumnya dikuasai perusahaan besar maupun perusahaan asing. Selama ini peternak mandiri berjalan sendiri-sendiri, sehingga sudah saatnya untuk bersatu dalam wadah koperasi. Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera diharapkan bisa menjawab kebutuhan para peternak mandiri, khususnya dalam pengadaan bibit ayam. Diharapkan Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera ini dapat menjadi sentra peternakan ayam dan telur. Apalagi, wilayah Subang dekat dengan Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) yang merupakan pangsa pasar terbesar akan kebutuhan ayam dan telur.

Dalam hal menyejahterakan peternak ayam petelur, pemerintah tidak akan membiarkan para peternak kecil atau petani berlahan sempit, berjalan sendiri-sendiri. Sudah saatnya peternak atau petani bergabung dalam kelembagaan koperasi agar usahanya bisa masuk skala ekonomi. Koperasi bisa menjadi offtaker yang akan berhubungan dengan pasar. Bahkan, pembiayaan di sisi hulu akan lebih mudah karena ada kepastian pembelian produk, karena selama ini, perbankan menganggap bahwa pembiayaan di sub-sistem agribisnis hulu ini sebagai pembiayaan berisiko.

Di samping itu, para peternak diharapkan dapat masuk ke dalam alur sirkuit ekonomi. Dimana para peternak tidak hanya mendapatkan keuntungan dari sisi budidaya saja. Dengan menjadi anggota koperasi, mereka juga bisa mendapat keuntungan lain dari segala proses ekonomi yang terjadi dari sub-sistem agribisnis hulu hingga hilir.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, saat kami menyampaikan permasalahan peternak ayam petelur yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional di Solo. Pemerintah telah menyarankan agar peternak membentuk kelompok ekonomi agar lebih berdaya saing dan punya posisi tawar dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut dinilai penting untuk mengatasi penurunan harga telur ayam ras di tingkat peternak karena kelebihan pasokan, serta keluhan biaya produksi yang tinggi akibat harga bibit ayam (DOC) dan pakan yang tinggi. Pemangku kebijakan dituntut berani bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar aturan agar persaingan yang tidak sehat dan gejolak di perunggasan segera terselesaikan. Peternak pun harus terus berbenah agar usahanya bisa berkesinambungan

Seiring berjalannya waktu, jumlah peternak rakyat mandiri kian tergerus. Penyebabnya adalah problem klasik yang terus berulang serta belum mampu terselesaikan hingga kini. Persoalan seperti harga ayam hidup (LB/live bird) di bawah harga pokok produksi (HPP) akibat meroketnya harga pakan dan DOC (ayam umur sehari). Terlebih, terjadi kelebihan pasokan LB yang tidak sesuai dengan permintaan pasar disinyalir merupakan permasalahan yang kerap menghantui peternak rakyat mandiri.

Akibat adanya pola budidaya peternak ayam mandiri dan integrator, seperti halnya di Solo Raya, maka peternak rakyat mandiri di wilayah Bogor juga kian punah. Pada tahun 2000, jumlah peternak mandiri sekitar 300 orang. Berikutnya, pada tahun 2010 berkurang menjadi 200 orang. Bahkan pada 2015 dan 2020 terus berkurang menjadi 80 serta 30 orang. Bahkan untuk mengumpulkan 15 peternak rakyat mandiri saja sangat susah. Merosotnya jumlah peternak mandiri ini bukan karena keuntungan yang didapatkan selama budidaya FS, justru selama 4 tahun terakhir ini, peternak rakyat mandiri mengalami kerugian yang luar biasa besarnya diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19. Selain harga pakan dan DOC mahal juga ditemukan perbedaan kualitas DOC yang diterima peternak rakyat mandiri.

Ketergantungan biaya sarana dan produksi ternak (saprotrak) bagi peternak rakyat mandiri tidak terlepas dari harga saprotrak. Peternak mandiri berharap kepada perusahaan perunggasan untuk menurunkan harga saprotrak. Menurutny, selama harga saprotrak di luar batas kewajaran, dapat dipastikan peternak rakyat mandiri tidak akan mendapatkan keuntungan dari usahanya.

Di lain pihak, kerugian yang dialami peternak rakyat mandiri juga akibat kelebihan pasokan telur ayam dari limpahan telur ayam yang tidak ditetaskan dengan harga yang lebih rendah. Sesuai dengan prinsip ekonomi dasar, maka apabila suplai telur melimpah, maka harga telur ayam akan turun. Akibatnya, peternak mandiri tidak bisa bersaing dengan perusahaan besar. Hal ini terjadi antara lain karena harga DOC dan harga pakan yang mahal, sehingga terjadi ketimpangan antara peternak mandiri dan integrator.

Peternak rakyat mandiri harus mendapatkan payung hukum dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang khusus melindungi peternak rakyat mandiri. Kalau bentuknya PP atau Perpres tidak harus melewati DPR, karena hanya melibatkan Presiden dan Kementerian terkait. Sejak lama hal itu sangat didambakan namun pemerintah sampai sekarang belum bisa menerbitkan aturan itu. Alasan yang selama ini diterima adalah Kementerian terkait sanggup menyelesaikan persoalan di perunggasan tanpa harus mengeluarkan PP atau Perpres.

Padahal dengan adanya PP atau Perpres tersebut, diharapkan persaingan yang tidak sehat di perunggasan segera terselesaikan. Adapun aturan-aturan yang telah disepakati sebaiknya dipatuhi sehingga tidak ditemukan penyimpangan yang melanggar aturan tersebut. Pemerintah harus tegas dan tidak pandang bulu bagi siapapun yang mengingkari aturan yang telah dibuat. Keputusan politik yang berpihak kepada peternak rakyat mandiri saat ini sangat dibutuhkan. Sementara itu, kebijakan-kebijakan yang positif bagi peternak rakyat mandiri telah dibuat cukup bagus. Sayangnya, ada saja pihak yang tidak menerapkan atas aturan yang telah dibuat. Lebih lanjut, jika ada perusahaan perunggasan terintegrasi maupun pemerintah mengajak peternak mandiri untuk menjadi peternak kemitraan, sudah seharusnya ditolak secara tegas. Palsanya, hal itu akan melemahkan eksistensi peternak rakyat mandiri. Bukannya memperbanyak peternak-peternak rakyat mandiri, kebijakan tersebut justru menciptakan buruh-buruh tani/ternak yang secara posisi harus patuh kepada perusahaan perunggasan terintegrasi.

Oleh karena itu pemerintah seharusnya tegas dalam mengimplementasikan aturan yang telah dibuat tanpa ada negosiasi dan kelonggaran, sehingga peternak rakyat mandiri bisa tetap eksis

dan hidup. Terlebih, jangan jadikan program kemitraan sebagai pembenaran, karena hal itu akan mengubah struktur kerja serta digiring menjadi buruh ternak.

3. Pertemuan dengan Pihak Berwenang

3.1 Pertemuan dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Untuk mencari akar persoalan dan solusi, Tim Dosen Mengabdi Pulang Kampung Departemen Agribisnis IPB yang dipimpin oleh Dr Andriyono Kilat Adhi, sudah langsung bertemu dan berdialog dengan Pejabat di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH Kementerian Pertanian). Dalam pertemuan yang berlangsung di Direktorat Jenderal PKH, disampaikan permasalahan yang ada di Peternakan Ayam Petelur di Solo Raya yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional. Antara lain disampaikan keluhan peternak atas penurunan harga telur ditingkat peternak karena kelebihan pasokan, padahal pada saat yang sama biaya produksi yang tinggi akibat harga DOC dan pakan yang meningkat.

Tim Dospulkam telah menyampaikan saran kepada Ditjen PKH agar para peternak rakyat petelur mandiri segera diberi payung hukum terkait dengan HAP telur ayam, jagung sebagai bahan baku pakan serta bibit ayam (DOC). Dengan adanya kepastian hukum tersebut, peternak dapat menikmati keuntungan yang wajar, petani jagung mendapat kepastian harga panen dan perusahaan pakan ternak dapat menentukan harga pakan yang wajar serta konsumen mendapat harga telur ayam yang pasti.

Dalam kaitan ini, pemerintah akan segera menindaklanjuti persoalan harga telur ayam, sehingga para stakeholder peternakan ayam petelur dapat memperoleh keuntungan yang wajar. Selain itu, pemerintah juga menyarankan agar peternak ayam petelur bersatu dalam wadah koperasi. Hal ini untuk memudahkan pemerintah dalam memfasilitasi peternak untuk mendapatkan DOC secara langsung dari perusahaan pembibit (breeder/integrator) dengan harga standar normal.

Pemerintah membantah bahwa mahalnya harga DOC karena adanya kelangkaan. Berdasarkan data yang ada, produksi bibit ayam petelur (DOC FS Layer) rata-rata per bulan sebanyak 14,8 juta ekor dan bibit ayam pedaging (DOC FS Broiler) rata-rata per bulan sebanyak 243,25 juta ekor atau per minggu sebanyak 57,9 juta ekor. Pasokan justru sangat berlebih dan karenanya dilakukan ekspor ke beberapa negara.

Mahalnya harga DOC kemungkinan besar disebabkan karena para peternak layer melakukan order sendiri-sendiri dan dengan jumlah yang sedikit, sehingga sulit untuk dilayani langsung dan akhirnya mendapatkan DOC dengan harga tinggi karena sudah dari tangan/pihak ke-tiga. Apalagi setelah dilakukan pengecekan harga DOC ditingkat pembibit masih standar normal.

Peternakan ayam petelur sudah menjadi urat nadi bagi perekonomian rakyat, sehingga nasib peternak ayam petelur tentu harus diperjuangkan. Semua pihak akan mengambil sikap bersama agar peternak tidak rugi. Apa yang menjadi keluhan peternak soal kesulitan mendapatkan DOC pasti akan dicarikan jalan keluar, agar biaya produksi dapat turun, dan peternak bisa bersaing

Terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak, pemerintah telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kota agar dapat memanfaatkan lahan-lahan pemerintah yang masih belum produktif untuk ditanami jagung. Penanaman jagung ini bisa juga dilakukan oleh BUMD, sehingga dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menyikapi tentang adanya kelebihan pasokan saat ini, pemerintah berpendapat bahwa hal ini semestinya ditanggapi dengan positif karena lebih baik kelebihan pasokan daripada kekurangan. Solusi paling nyata adalah dengan terus mendorong pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi untuk terus meningkatkan ekspor, selain juga mendorong kerjasama pemasaran antara produsen telur ayam di Solo dengan daerah lain seperti yang sudah dilakukan dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Dalam hal menyejahterakan peternak ayam petelur, pemerintah tidak akan membiarkan para peternak kecil atau petani berlahan sempit, berjalan sendiri-sendiri. Sudah saatnya peternak atau petani bergabung dalam kelembagaan koperasi agar usahanya bisa masuk skala ekonomi. Koperasi bisa menjadi oftaker yang akan berhubungan dengan pasar. Bahkan, pembiayaan di sisi hulu akan lebih mudah karena ada kepastian pembelian produk, karena selama ini, perbankan menganggap bahwa pembiayaan di sub-sistem agribisnis hulu ini sebagai pembiayaan berisiko.

Di samping itu, para peternak diharapkan dapat masuk ke dalam alur sirkuit ekonomi. Dimana para peternak tidak hanya mendapatkan keuntungan dari sisi budidaya saja. Dengan menjadi anggota koperasi, mereka juga bisa mendapat keuntungan lain dari segala proses ekonomi yang terjadi dari sub-sistem agribisnis hulu hingga hilir.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, saat kami menyampaikan permasalahan peternak ayam petelur yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional di Solo. Pemerintah telah menyarankan agar peternak membentuk kelompok

ekonomi agar lebih berdaya saing dan punya posisi tawar dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut dinilai penting untuk mengatasi penurunan harga telur ayam ras di tingkat peternak karena kelebihan pasokan, serta keluhan biaya produksi yang tinggi akibat harga bibit ayam (DOC) dan pakan yang tinggi.

3.2 Pertemuan dengan Kepala Badan Pangan Nasional

Dalam upaya menyampaikan permintaan peternak ayam petelur yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional Solo kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas), tim Dospulkam telah bertemu dengan Kepala Bapanas di Jakarta. Bapanas merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Berdiri sejak 2021, Bapanas memegang peranan penting dalam urusan pangan untuk menciptakan kedaulatan, ketahanan, serta kemandirian pangan bagi negara.

Bapanas dibentuk dengan berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2021 tentang Bapanas yang merupakan amanat dari UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Struktur organisasi Bapanas sendiri terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, kemudian beberapa deputi termasuk Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, juga Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Terdapat 11 komoditas pangan yang menjadi wewenang kerja Bapanas, termasuk telur dan daging unggas.

Bapanas pun telah menyusun skenario yang akan segera dilaksanakan secara bertahap. Hal itu untuk merespons tak kunjung membaiknya harga panen live bird (ayam hidup) broiler (ayam pedaging) dan tidak stabilnya harga telur ayam ras di tingkat produsen dan konsumen.

Adapun skenario yang disusun diantaranya adalah dengan pengadaan cold storage atau fasilitas penyimpanan dingin untuk karkas, mendorong penyerapan live bird oleh BUMN dan perusahaan swasta pembibitan ayam (integrator maupun non integrator), dan meninjau ulang harga pakan. Juga memperkuat kapasitas dan jangkauan BUMN Berdikari untuk memasok bibit DOC (ayam umur sehari) broiler maupun layer (ayam petelur) yang seringkali tiba-tiba melangka dan melambung harganya.

Sebagaimana beras dan jagung, nanti Kementerian BUMN juga menugasi Bulog sampai ke daerah untuk menangani daging ayam dan telur. Karena Bapanas ini juga harus mempunyai tangan sampai di daerah, dan salah satu operator lapangan Bapanas adalah Bulog. Oleh karena itu, Bulog di daerah perlu menangani stok daging ayam dan telur karena sentra-sentra produksi unggas itu sudah terpetakan.

Bapanas mendapatkan keluhan dari peternak, terkait soal tidak kunjung turunnya harga pakan meskipun harga jagung telah turun dari sekitar Rp 5.000 – 6.000 per kg menjadi Rp 4.200 per kg. Masih ada pula peternak yang mengeluh karena ada tawaran tak tertulis untuk ‘bundling’ DOC dengan pakan dengan rasio 1:2,75 bahkan ada yang 1:3. Bapanas akan segera bertemu dengan pabrik pakan untuk membicarakan hal tersebut. Namun dia pun setuju jika Pinsar juga mengajukan cara lain, yakni Pinsar mendirikan pabrik pakan sendiri. Bapanas akan memberi fasilitasi, apa saja yang dibutuhkan.

Sebagai salah satu tangan Bapanas, Bulog pusat maupun daerah dapat bertindak sebagaimana pada komoditas beras, mengintervensi stok dengan menyimpan dan mendistribusikan ulang. Surplus daging broiler dan telur ayam juga tidak lagi dipandang sebagai kelebihan yang harus dipangkas produksinya, tetapi justru harus membuat cadangan/stok nasional (cadangan pangan pemerintah) daging ayam (beku) dan telur ayam yang setiap saat bisa dimobilisasi untuk berbagai keperluan. Baik saat terjadi lonjakan kebutuhan, memasok daerah rawan pangan/rawan stunting, bantuan pangan pemerintah, operasi pasar maupun untuk keperluan tanggap darurat bencana.

Terlebih kondisi pangan dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Bukan hanya soal krisis Ukraina, tetapi risiko krisis pangan dunia semakin meningkat. Mau tidak mau Bapanas harus mengantisipasi ini, tidak hanya melihat kondisi sekarang yang surplus.

Oleh karena itu para pelaku bisnis peternakan perlu duduk bersama untuk menentukan angka produksi melalui angka konsumsi riil. Mulai dari konsumsi telur ayam dan daging unggas per kapita nasional, sehingga bisa ditentukan berapa jumlah DOC final stock yang harus dipenuhi, dan kemudian diturunkan menjadi populasi PS dan GPS. Dengan cara ini dapat dibangun ekosistem industri perunggasan yang lebih baik.

Jelas, diperlukan data sebagai pijakan untuk membahas hal-hal di atas, salah satunya adalah data perunggasan Kementerian Pertanian (Kementan). Namun sistem informasi perunggasan di Kementan sedang tidak bisa diakses. Efeknya bukan hanya menghambat analisis pelaku industri perunggasan, namun juga menyebabkan semua proses perizinan impor tertunda. Kerusakan ini mengganggu semua proses izin impor GPS.

Adanya kelebihan pasok anak ayam sebanyak 24 %, maka ke depan supply live bird akan berlebih. Bahkan beberapa minggu ke belakang harga DOC sekitar Rp 4.000 per ekor, tetapi saat ini sudah mencapai lebih dari Rp 6.000 per ekor. Diperkirakan kalau harga live bird turun, maka harga DOC dan pakan juga turun. Terlebih harga pakan yang cenderung tidak ada perubahan yang sampai saat ini sudah ada kenaikan kurang lebih 13 % dari awal tahun.

Dengan kondisi seperti itu, seharusnya ada penanganan khusus. Di sinilah peran Bapanas untuk melakukan upaya semacam mitigasi. Harus dicarikan peta jalannya saat harga di bawah HPP peternak, terutama peternak mikro, kecil, dan menengah. Jadi bukan hanya komoditasnya, tetapi juga pelaku usahanya diperhatikan. Dengan kata lain, Tugas dan Fungsi Bapanas adalah harus mampu menjaga kesetimbangan dan stabilisasi harga serta membangun cadangan pangan nasional sekaligus melakukan proteksi pasokan di segmen hulu dan hilir

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN (OUTPUT DAN OUTCOME)

Tim Dospulkam yang mendapat amanah dari Pengurus Pinsar Petelur Nasional Solo Raya untuk menyampaikan kepada pihak berwenang terkait dengan permintaan anggota PPN agar dapat memperoleh Saprotrak (bibit ayam/DOC dan pakan ternak) dengan harga yang wajar. Dari pertemuan dengan Ditjen Peternakan Kementan dan Badan Pangan Nasional, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah akan segera menindaklanjuti persoalan harga telur ayam, sehingga para stakeholder peternakan ayam petelur dapat memperoleh keuntungan yang wajar. Selain itu, pemerintah juga menyarankan agar peternak ayam petelur bersatu dalam wadah koperasi. Hal ini untuk memudahkan pemerintah dalam memfasilitasi peternak untuk mendapatkan DOC secara langsung dari perusahaan pembibit (breeder/integrator) dengan harga standar normal.
2. HAP telur ayam yang diusulkan oleh Badan Pangan Nasional sulit direalisasikan oleh peternak, apabila harga jagung atau pakan ayam belum turun menjadi Rp. 4.200 per kg di tingkat petani dan bibit ayam (DOC) turun di kisaran Rp. 9.000 – Rp. 11.000 per ekor. Selain itu, diharapkan agar HAP telur ayam perlu disertai dengan penetapan HAP bibit (DOC) serta pakan ayam yang berkekuatan hukum.
3. Pemerintah menyarankan agar peternak membentuk kelompok ekonomi agar lebih berdaya saing dan punya posisi tawar dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut dinilai penting untuk mengatasi penurunan harga telur ayam ras di tingkat peternak karena kelebihan pasokan, serta keluhan biaya produksi yang tinggi akibat harga bibit ayam (DOC) dan pakan yang tinggi.
4. Tim Dospulkam telah menyampaikan kepada pengurus Pinsar Petelur Nasional Solo Raya agar komunikasi dan konsolidasi horizontal antar peternak dapat dilakukan secara terus menerus. Hal ini untuk mengarahkan agar peternak merasa memiliki (in-group feeling) organisasi Pinsar Petelur Nasional serta dapat menghindari rayuan untuk menjadi anggota peternak integrator.
5. Tim Dospulkam akan tetap memantau proses penyusunan HAP Bibit (DOC) ayam petelur, Jagung, Pakan Ternak Ayam Petelur dan mengkomunikasikan proses tersebut kepada Pengurus Pinsar Petelur Nasional Solo Raya.

6. Harga telur di tingkat retail menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru saat ini berada pada angka Rp. 31.000/kg. Setelah mengalami masa sulit dengan tingginya harga sarana produksi peternakan, peternak ayam petelur telah menikmati harga yang sangat baik. Walaupun di lain pihak, masyarakat sebagai konsumen telur ayam harus mengeluarkan dana yang lebih untuk membeli komoditas tersebut. Oleh karena itu, adanya aturan hukum yang mengikat dari Pemerintah akan membuat bisnis peternakan ayam petelur lebih stabil dan pasti

HAMBATAN PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASINYA

- Kegiatan Dosen Pulang Kampung tahun 2022, akhirnya dapat terlaksana pada bulan Juli 2022. Tim Dospulkam telah menyesuaikan rencana kegiatan yang tertuang dalam proposal dengan hasil brainstorming dengan PIC Pinsar Petelur Nasional Solo Raya. Permasalahan utama pada Pinsar Petelur Nasional Solo Raya bukan pada kegiatan on-farm (budidaya) ayam petelur, tetapi pada ketidakstabilan serta tingginya harga sarana produksi peternakan, yakni bibit, pakan dan jagung. Akibat tingginya sapronak dan rendahnya harga jual telur ayam, membuat peternak ayam petelur mengalami kerugian dan tidak sedikit yang gulung tikar.
- Pada saat menghadapi kondisi tersebut, akhirnya kegiatan Dospulkam lebih fokus pada bagaimana Tim Dospulkam dapat membantu meringankan beban peternak yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Pinsar Petelur Nasional Solon Raya. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Pengurus PPN Solo Raya, akhirnya dapat disimpulkan bahwa Peternak Petelur Solo Raya mengharapkan agar Tim Dospulkam dapat membantu menyusun formulasi Harga Pokok Penjualan (HPP) Telur merupakan fungsi dari harga pakan, harga DOC, Feed Conversion Ratio (FCR) dan Harga Jagung. Hasil kajian dari Tim Dospulkam akan dijadikan acuan bagi peternak petelur yang tergabung dalam PPN Solo Raya.
- Dalam upaya menindaklanjuti harapan yang diinginkan oleh Pengurus PPN Solo Raya, Tim Dospulkam akan Menyusun Tim Peneliti Lintas Departemen di IPB. Hal ini mengingat hasil kajian diperkirakan tidak hanya berlaku pada peternak yang tergabung dalam PPN Solo Raya, akan tetapi akan digunakan lebih luas di lingkup peternakan ayam petelur dan broiler di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, kajian ilmiah ini akan digunakan juga oleh pemangku kebijakan terkait, seperti Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Pangan Nasional, Bappenas, Kementerian Perdagangan dan lainnya.
- Terkait dengan diplomasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan serta Badan Pangan Nasional, diperoleh informasi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh peternak PPN Solo Raya, juga menjadi perhatian pemerintah juga. Usulan yang disampaikan Tim Dospulkam agar pemerintah segera mengeluarkan payung hukum yang pasti untuk menetapkan Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP) bibit ayam (DOC), Jagung dan Pakan Ternak ditanggapi positif dan menjadi catatan khusus untuk program tahun 2023. Apabila payung hukum tersebut dapat dikeluarkan pemerintah, maka usaha

Tim Dospulkam menggunakan jalur diplomasi ke pemangku kebijakan dapat berhasil dengan baik.

- Hubungan baik yang sudah terjalin antara Tim Dospulkam IPB dengan Pengurus PPN Solo Raya akan tetap dipelihara dan diintensifkan melalui pertemuan-pertemuan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Tidak menutup kemungkinan apabila Pengurus PPN Solo Raya melakukan kunjungan ke Kementerian Pertanian maupun diskusi dengan Tim Dospulkam di Bogor. Agar kegiatan dapat berlanjut, diharapkan LPPM IPB dapat melanjutkan program Dospulkam 2023, sehingga semua rencana yang telah dicanangkan dapat direalisasikan.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Foto Bersama Pengurus Pinsar Petelur Nasional Solo Raya



Lampiran 2. Meeting Bersama Pengurus Pinsar Petelur Nasional Solo Raya



Lampiran 3. Makan Bersama Pengurus Pinsar Petelur Nasional Solo Raya